



**PENETAPAN**

Nomor 80/Pdt.G/2024/PA.Dp



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama xxxxx yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Cerai Gugat antara:

**PENGUGAT**, tempat dan tanggal lahir xxxxx, 20 Mei 1994, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxxxx, pendidikan D2, tempat kediaman di xxxxx xxx, xx xxxxxx xxx, xxxxx, xxxxx, Kabupaten xxxxx, Nusa Tenggara Barat, selanjutnya disebut Pengugat;

**m e l a w a n,**

**TERGUGAT**, tempat dan tanggal lahir Bima, 26 Juli 1995, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxxxx, pendidikan SLTA, tempat kediaman di xxxxx xxx Rt 004/Rw 000, xxxxx, xxxxx, Kabupaten xxxxx, xxxx xxxxxxxx xxxxx, selanjutnya disebut Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut.

Telah mendengar keterangan Pengugat di muka sidang.

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pengugat dalam surat gugatannya bertanggal 17 Januari 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama xxxxx pada hari Kamis tanggal 18 Januari 2024 dengan register perkara Nomor 80/Pdt.G/2024/PA.Dp telah mengajukan gugatan yang berbunyi sebagai berikut:

Hal. 1 dari 6 Hal. Pen. No.80/Pdt.G/2024/PA.Dp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami istri yang telah menikah pada tanggal 24 Februari 2019 dan telah dicatat oleh Kantor Urusan Agama KUA Kecamatan xxxxx, Kabupaten dompu, sesuai Nomor 0045/017/II/2019, tanggal 24 Februari 2019;
2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat, di xxxxx xxx, Rt 004 Desa xxxxx kecamatan xxxxx, Kabupaten xxxxx, dan telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami istri (ba'da dukhul); Sudah di karuniai satu anak perempuan bernama **Silva Julianna** lahir tanggal 01 Juli 2020 (3 Tahun)
3. Bahwa sejak awal pernikahan (2019) rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis dan sering terjadi pertengkaran disebabkan oleh hal-hal berikut:
4. Bahwa sejak awal pernikahan Tergugat dan Penggugat sering cekcok di karenakan adanya pihak ketiga yaitu sosok wanita idaman lain;
  - a. Tergugat sering melakukan KDRT terhadap Penggugat bahkan dalam keadaan Penggugat hamil tua
  - b. Bahwa Tergugat pernah kedapatan selingkuh dengan wanita yang merupakan rekan kerja Penggugat pada tahun 2020
  - c. Tergugat sering menjatuhkan talak terhadap penggugat bahkan Tergugat pernah Menalak di depan orang tua Penggugat;
  - d. Tergugat Selalu mendesak agar Penggugat cepat menceraikan Tergugat;
5. Bahwa sejak 1 Oktober 2023 Tergugat sudah tidak pernah memberikan nafkah lahir dan batin terhadap penggugat sampai saat ini;
6. Bahwa sejak Oktober 2023 Tergugat salalu pulang larut malam yang menyebabkan Penggugat merasa tidak nyaman
7. Penggugat sudah tidak ada rasa peduli terhadap anak yang menyebabkan anak penggugat dan tergugat sering sakit-sakitan;
8. Bahwa saat ini Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama sejak Oktober 2023, Tergugat pergi dari tempat kediaman bersama meninggalkan Penggugat dan tinggal di rumah saudara kandung nya di alamat tersebut di atas;

Hal. 2 dari 6 Hal. Pen. No.80/Pdt.G/2024/PA.Dp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa selama berpisah tempat tinggal, baik Penggugat maupun Tergugat sudah jarang komunikasi dan hubungan yang baik serta sudah tidak menjalankan kewajibannya sebagai suami istri;
10. Bahwa dengan keadaan rumah tangga sebagaimana tersebut di atas, Penggugat merasa sudah tidak sanggup lagi untuk tetap mempertahankan ikatan pernikahan dengan Tergugat;
11. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah pernah diupayakan damai oleh Tokoh Masyarakat, Kepala Dusun, Babinsa, Kepala Desa, namun tidak berhasil;
12. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama xxxxx cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

PRIMER:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (**Murtabin Bin Husni**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Menetapkan biaya perkara menurut ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku;

SUBSIDER:

Atau bilamana Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut oleh Jurusita Pengadilan Agama xxxxx;

Hal. 3 dari 6 Hal. Pen. No.80/Pdt.G/2024/PA.Dp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa sebelum persidangan dilanjutkan, Penggugat telah mengajukan permohonan pencabutan perkaranya secara lisan dengan alasan bahwa Penggugat telah hidup rukun kembali dengan Tergugat;

Bahwa karena Penggugat telah mencabut gugatannya, maka proses pemeriksaan perkara ini dinyatakan telah selesai sehingga tidak perlu lagi dilanjutkan;

Bahwa untuk singkatnya uraian penetapan ini maka semua berita acara persidangan ini dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Penggugat telah mengajukan permohonan secara lisan untuk mencabut gugatannya sebelum perkaranya diperiksa, dan Tergugat belum mengajukan jawaban;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 271 Rv. Jo Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 1841 K/Pdt/1984 ditegaskan bahwa Penggugat dapat mencabut perkaranya sepanjang hal itu dilakukan sebelum ada jawaban dari Tergugat, atau setelah Tergugat menyampaikan jawabannya, maka pencabutan perkara hanya dapat dilakukan apabila ada persetujuan dari Tergugat;

Menimbang, bahwa untuk itu maksud Penggugat untuk mencabut gugatannya dapat dikabulkan dan pemeriksaan perkara ini dinyatakan selesai;

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan perkara ini dilakukan setelah proses persidangan berlangsung maka biaya yang timbul dalam perkara ini harus diperhitungkan.

Menimbang, bahwa karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dan ditambah dengan perubahan pertama menjadi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua menjadi Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya perkara dibebankan kepada Penggugat.

Hal. 4 dari 6 Hal. Pen. No.80/Pdt.G/2024/PA.Dp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan segala peraturan dan kaidah hukum yang berhubungan dengan perkara ini.

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara nomor 80/Pdt.G/2024/PA.Dp dari Penggugat;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama xxxxx untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlahh Rp.162.800,- (seratus enam puluh dua ribu delapan ratus rupiah)

*Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Senin, tanggal 12 Februari 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 2 Sya'ban 1445 Hijriyah, oleh kami Jauharil Ulya, S.H.I., M.Sc sebagai Ketua Majelis, Nova Choiruddin Mahardika, S.H.I., M.S.I. dan Faiz Amrizal Satria Dharma, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 12 Februari 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 2 Sya'ban 1445 Hijriyah, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Fitri, S.H., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.*

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

**Nova Choiruddin Mahardika, S.H.I., M.S.I.**

**Jauharil Ulya, S.H.I., M.Sc**

**Faiz Amrizal Satria Dharma, S.H., M.H.**

Hal. 5 dari 6 Hal. Pen. No.80/Pdt.G/2024/PA.Dp



Panitera Pengganti,

**Fitri, S.H.**

**Rincian Biaya Perkara:**

|                                 |        |
|---------------------------------|--------|
| PNBP:                           |        |
| a. Pendaftaran                  | 30.000 |
| b. Panggilan pertama para Pihak | 20.000 |
| c. Redaksi                      | 10.000 |
| Biaya Proses                    | 75.000 |
| Biaya Panggilan                 | 17.800 |
| Meterai                         | 10.000 |

**Jumlah** **162.800**

(seratus enam puluh dua ribu delapan ratus rupiah)

Hal. 6 dari 6 Hal. Pen. No.80/Pdt.G/2024/PA.Dp